

---

**ISLAM DAN KEBANGSAAN:  
STUDI TENTANG POLITIK ISLAM  
MASA PERGERAKAN NASIONAL DI INDONESIA**

*Oleh:*

**Nasihin, M.A.<sup>1</sup>**

**Abstract**

This paper describes the political Islam that is applied by the Dutch government during the National Movement and its implications to the formation of the State of Indonesia. As a government policy, political Islam is precisely be the trigger for a variety of organizations labeled Islam to realize itself as an entity of Muslims and as people bumiputera. Principal important issues raised in this paper is how Islam can become binding nationality bumiputera people in Indonesia?. Re related to social phenomena of all Islamic, from time to time, in principle, does not shift to the issue of the integrity of the Ummah and the " truth " doctrine. Therefore, a brief conclusion resulting from this paper is that, during the national movement, Islam has found the "common enemy" in the form of colonialism and the Christianization which has been legalized by the Dutch government. In this context, the policy of Political Islam is precisely turned into motivation for the creation of a unity of the ummah (read: unity, ed) In building a national image and "truth" doctrine, whichhas been a crucial struggle for Muslims. In a different context, Political Islam is very powerful precisely applied by the colonialists as an attempt to break up the unity of the ummah or people bumiputera, when Muslims and or people faced with the problem of building bumiputera state system. Islam is able to be binding unity" nationality", but Islam has not been able to be binding "state" bumiputera people.

*Keywords: Islam, Nationality, Political Islam*

**A. Pendahuluan**

Dalam tradisi sejarah Indonesia, Politik Islam menjadi bagian penting sebagai kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, juga Jepang pada masa pergerakan nasional hingga proses pembentukan Negara Indonesia. Akibat diterapkannya Politik Islam, justeru Islam menjadi senjata ampuh dalam membangkitkan perlawanan terhadap kolonialisme dan yang menyerupainya. Politik Islam mampu menjadi pelecut bagi seluruh umat Islam dan atau rakyat bumiputera dalam membangun sebuah sistem sosial kebangsaan, akan tetapi dalam konteks yang lain, ketika umat Islam dihadapkan pada persoalan sistem politik kenegaraan, justeru umumnya diantara sesama organ pergerakan Islam mulai saling bertikai. Pada tahap inilah, perbincangan mengenai dinamika dan atau corak manifestasi Islam pada masing-masing organ pergerakan Islam di Indonesia menjadi sangat penting untuk diteliti. Seperti halnya Taufik Abdullah, ia telah mengamati persoalan ini secara simultan dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Meski ia tidak melakukan kajian historis secara mendetail, akan tetapi ia telah mengurai

---

\* Email: [amunsent@gmail.com](mailto:amunsent@gmail.com).

secara analitis tentang gejala sosial ke-Islam-an itu.<sup>1</sup> Ia menilai bahwa keutuhan ummat dan “kebenaran” ajaran adalah tema menetap dalam sejarah Islam.<sup>2</sup>

Tulisan ini lebih spesifik mengungkap gejala sosial ke-Islam-an yang khususnya diperankan oleh berbagai organ Islam dalam kaitannya dengan proses penerapan Politik Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda. Studi ini pada dasarnya dapat diamati pada tahun 1905 sampai 1945. Pada tahun 1905, Islam -yang diasumsikan sebagai “bangsa”- menjadi identitas perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan praktik Kolonialisme dan yang menyerupainya. Ketika Islam dihadapkan dengan kolonialisme dan yang menyerupainya -terlepas dari adanya perbedaan struktur intern tentang ke-Islam-an yang dipahami pada masing-masing organ Pergerakan Islam- batasan itu akan tampak dengan jelas dan menjadikan Islam sebagai sebuah kekuatan tunggal. Pada prinsipnya, Islam yang hadir melalui coraknya masing-masing pada masa pergerakan nasional (sebagai hasil dari interaksi sosial dan kultural) merupakan sebuah upaya untuk mendudukkan nilai Islam sepenuhnya dalam memaknai sebuah bangsa, dan tentunya tentang negara.<sup>3</sup>

Kondisi ini menjadi berbeda ketika dinamisasi Islam dalam konteks perbenturan kepentingan doktriner dan sosial diantara organ pergerakan Islam dalam upayanya mencapai tujuan tentang negara. Pada kondisi ini, Islam muncul dengan wajah yang berbeda, walaupun tujuan dari masing-masing organ pergerakan Islam ini sama, yakni untuk mencapai kemapanan Islam dan atau pencapaian terhadap sebuah negara. Garis demarkasi diantara sesama organ pergerakan Islam itu menjadi tampak jelas dan semakin membesar.<sup>4</sup> Kondisi ini dapat dilihat pada tahun 1945, ketika rakyat bumiputera berjibaku mempersiapkan berbagai alat perlengkapan sebuah negara. Pada kondisi ini, eksekusi dari Politik Islam yang telah diterapkan oleh pihak kolonialis sebelumnya mulai dirasakan oleh Umat Islam dan atau Rakyat Bumiputera. Rakyat Bumiputera saling bertikai untuk menentukan pilihan yang paling benar dalam mewujudkan pandangan dasar serta konsep tentang suatu negara.<sup>5</sup> Identitas Islam menjadi lemah dan tidak lagi diperhitungkan secara ketat. Kondisi demikian menjadi cerminan dalam upaya untuk menganalisa kasus-kasus ke-Islam-an dalam konteks kekinian di Indonesia. Dengan demikian pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana Islam mampu menjadi pengikat “kebangsaan” dan “kenegaraan” rakyat bumiputera di Indonesia?

## **B. Semangat Gerakan Pan-Islamisme di Indonesia**

Telah berabad-abad Islam mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak bukti sejarah yang menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Di Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Leran, Gresik terdapat makam Fatima binti Maimun, yang meninggal pada 7 Rajab 475 H (1082 M).<sup>6</sup> Di wilayah yang sama

<sup>1</sup> Taufik Abdullah., *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987)., hal. Iv.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 250.

<sup>3</sup> Nasihin., *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012)., hal. 223-254.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 165-182.

<sup>5</sup> Pada proses berikutnya, yakni pada Pemilu tahun 1955, perolehan suara dari beberapa partai Politik Islam seperti Partai Masyumi milasnya, akan tetapi kekuatan Islam ini tidak mampu menjadi penggerak dalam proses menentukan sebuah kebijakan tentang Negara Indonesia. Selengkapnya lihat Subehan Sd., *Langkah Merah: Gerakan PKI, 1950-1955* (Jogjakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1996).

<sup>6</sup> Fatimah Binti Maimun adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan meninggal di Kecamatan Leran, Gresik Jawa Timur. Makamnya terkenal dengan sebutan Makam Panjang. Sebutan ini

(Gresik) juga terdapat makam Maulana Malik Ibrahim, yang meninggal 12 Rabiulawal 822 H (1419). Selain itu, terdapat Wali Sanga<sup>7</sup> sebagai penyebar Islam di Jawa menjadi legenda yang bukti peninggalan fisiknya masih dapat dilihat hingga sekarang.<sup>8</sup>

Di Sumatera, bukti perkembangan agama Islam juga dapat ditelusuri hingga sekarang. H. M. Zainuddin dianggap sebagai orang Islam pertama yang datang di Aceh. Ia adalah Komandan armada perang dari Persia yang saat itu membawa 33 buah kapal menuju Tiongkok. Kapal-kapal itu berlabuh di beberapa tempat seperti: Malaya, Kedah, Siam, Kamboja, Annam, Jawa, Brunai, Makassar, Kalimantan, Maluku, dan beberapa kapalnya juga singgah di pesisir Aceh (Andalas Utara) pada tahun 82 H (717 M). Dari proses inilah, Islam dapat dikatakan telah disebarkan di Aceh, yang akhirnya memberi pengaruh bagi perkembangan kerajaan Perlak.<sup>9</sup>

Sampai pada abad ke-20, perkembangan Islam di Indonesia semakin tampak. Kuatnya arus perkembangan Islam ini adalah akibat dari proses menyebarnya gerakan *Pan-Islamisme* (kebangkitan Islam) yang datang dari Timur Tengah. Melalui gerakan ini, semangat pembaharuan Islam hadir dan mewarnai pemikiran orang Indonesia yang telah memeluk Agama Islam. Bangkitnya kekuatan Islam di Timur Tengah, memberikan sumbangsih cukup besar dalam membentuk rasa kesatuan dikalangan rakyat bumiputera.<sup>10</sup> Tidak terlepas dari dasar utama Turki adalah Islam, sebuah kesadaran akan terbentuknya “Islam satu” menjadi motivasi penting dalam membantu umat Islam di Indonesia. *Pan-Islamisme* yang dimotori Turki dan juga perkembangan afiliasi politik internasional antara Turki dan Jerman, memberikan perhatian terhadap umat Islam di Indonesia.<sup>11</sup>

Semangat gerakan *Pan-Islamisme* yang ada di Timur Tengah, hadir ke Indonesia dibawah oleh para haji yang datang setelah menunaikan ibadah haji di Mekah. Keterkaitan antara para haji sebagai penyebar warta Islam di Indonesia dengan perkembangan *Pan-Islamisme* di Timur Tengah, bukanlah semata-mata sebuah kebetulan. Pada mulanya mereka ber-haji, dan menetap cukup lama di Mekah. Sembari menetap, mereka menyempatkan untuk *ngangsu kaweruh* (belajar) tentang ilmu Agama Islam. Pada kurun waktu yang lama ini, para haji telah disugahi dan melihat secara langsung sebuah proses politik di wilayah ini hingga abad ke-20.<sup>12</sup> Sirkulasi

banyak kalangan memberikan tafsiran berbeda-beda, akan tetapi, bentuk riil makamnya adalah panjang mencapai 8-10 meter. H.J. De Graaf dan TH. Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI* (terj.) (Jakarta: PT. Pustaka Utama dan KITLV, 1986), hal. 22.

<sup>7</sup> Wali sanga adalah penyebar agama Islam khususnya di pulau Jawa. Wali sanga dikisahkan sebagai sebuah perkumpulan para wali yang berjumlah sembilan. Jumlah tersebut tetap sembilan dan disetiap periode tertentu (meninggal) akan dilakukan pengangkatan seorang wali sebagai pengganti. Diperkirakan tahun 1404 M – 1436 M, telah terjadi tiga kali pergantian keanggotaan dalam perkumpulan sembilan wali tersebut. Lihat Moh. Zainal S., *Sedjarah Bunga dan Bergelornya Pesantren Sampurnan* (Gresik: BKK Maskumambang, 1962), hal. 3-4.

<sup>8</sup> Uraian panjang mengenai penyebaran Islam di Jawa selebihnya dapat dilihat dalam H.J. De Graaf dan Th. Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, terj., Jakarta, PT. Pustaka Utama dan KITLV, 1986. hal. 20-23.

<sup>9</sup> Perlu di jelaskan lebih lanjut, bagi semua umat Islam, apabila dari setiap ucapan dan perbuatannya untuk kepentingan siar Islam dianggap sebagai mubaligh. Berkaitan dengan siapa orang Islam yang datang ke Indonesia dan mula-mula berada di wilayah mana dalam proses penyebaran Islam, lihat Aboebakar Aceh, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia* (Semarang: C.V. Ramadhani, 1979), hal. 23.

<sup>10</sup> Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 115-116.

<sup>11</sup> Kees Van Dijk, dalam Nico J.G. Kaptain (edt.), *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh* (Leiden-Jakarta, Seri INIS XLIII, 2003), hal. 31-41.

<sup>12</sup> Relasi antara para ulama Indonesia dengan ulama Timur Tengah telah terjalin jauh sebelum

politik Internasional terkait kekuatan berbagai negara Islam (terutama Turki) yang mampu mengimbangi kekuatan negara di luar Islam, menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam dunia. Para haji menilai bahwa betapa pentingnya wacana Islam dan politik internasional bagi mereka. Melalui para haji yang pulang ke daerah asalnya masing-masing, warta itu disebar dan sejak saat itu gerakan *Pan-Islamisme* telah menarik simpati kalangan umat Islam Indonesia untuk bersatu di bawah panji-panji Islam di bawah naungan Turki Ottoman.

Haji merupakan bagian dari rukun Islam (bila mampu), sebagai umat Muhammad SAW. Kewajiban haji bagi setiap muslim harus diimbangi dengan adanya kemampuan seorang muslim secara menyeluruh, baik kemampuan secara ekonomi, fisik, kemantapan hati, serta kemantapan spiritual. Haji menjadi sebuah perjalanan sakral yang bernilai ibadah, sebagai wujud tunduknya seorang muslim kepada Allah SWT. Haji tidak hanya dilihat dari nilai ekonomisnya semata, akan tetapi, sifat dasar haji sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi orang Islam yang "mampu" untuk melengkapi nilai ke-Islam-an selain dari syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Haji menjadi penutup kelengkapan nilai-nilai ke-Islam-an sebagai seorang muslim. Rukun Islam menjadi pengikat kesempurnaan seorang muslim yang benar-benar menjalankan agama Islam seperti yang telah di *mauidloh*-kan (dicontohkan) oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, berbagai cara akan dilakukan oleh orang muslim agar dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci (Mekah).<sup>13</sup>

Bukti nyata dari pentingnya haji bagi umat Islam Indonesia adalah meningkatnya jumlah jamaah haji menjelang pertengahan abad ke-19. Jumlah jamaah haji pada tahun 50-60-an mencapai 1600, pada tahun 70-an mencapai 2600 dan pada tahun 80-an mencapai 4600.<sup>14</sup> Pada tahun 1900-1914, para jamaah haji yang datang ke Djedah sebanyak 192.167 orang. Jumlah keseluruhan jamaah haji dunia pada akhir tahun 1914 adalah 56.855, sedangkan jamaah haji Indonesia yang tercatat adalah sebanyak 28.427. Dengan demikian, jumlah jamaah haji Indonesia, menyumbang lebih dari setengah jumlah jamaah haji dunia saat itu, sebuah jumlah yang sangat besar saat itu.<sup>15</sup>

Sekembalinya mereka dari Mekah, berbagai ilmu diajarkan kepada masyarakat setempat. Pengajaran akrab dilakukan di pesantren.<sup>16</sup> Semakin banyaknya haji yang

---

sebelum abad ke-20. Hubungan mereka lebih didasarkan pada proses penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam dan secara turun temurun menjadi jaringan ulama diberbagai nusantara. di Aceh terdapat Abdurrauf Sinkil, Nuruddin Ar-Raniri, serta dari Sulawesi terdapat Muhammad Yusuf Al-Maqassari dan berbagai para syaikh atau kiyai yang tersebar di Jawa dan pulau lainnya, *ibid.*, bab IV "Para Perintis Gerakan Pembaharuan Islam".

<sup>13</sup> Snouck Hurgronje memberikan kritik tajam mengenai perilaku berhaji bagi umat Islam Indonesia khususnya, ia mengatakan bahwa naik haji lebih pada penghambur-hamburan uang bagi kalangan umat Islam. Perjalanan-perjalanan mereka ke Mekah lebih mempunyai arti komersil daripada keagamaan. Lihat Snouck Hurgronje, *Perayaan Mekah, seri INIS jilid V* (Jakarta: INIS, 1989), hal. 108.

<sup>14</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888* (The Hague: Nijhoff, 1966), hal. 219. Bandingkan dengan Anthony Reid, "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia" dalam Nico J.G. Kaptain (edt), *op.cit.*, hal. 4. Anthony Reid mencatat bahwa jumlah jamaah haji di akhir abad ke-19 antara 4000-8000 orang.

<sup>15</sup> Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia* (Djakarta: P.T. Kartika Tama, 1971), hal. 14-15.

<sup>16</sup> Istilah Pesantren disini hanya untuk menunjukkan sifat atau model pendidikan tradisional. Model pendidikan tersebut seringkali memanfaatkan masjid, langgar, Surau, dll sebagai tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, khususnya agama Islam. Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), bab IV.

datang ke kampung halaman, semakin banyak pula pesantren yang berdiri di berbagai daerah di Indonesia. Kendati tidak semua haji mendirikan pesantren, akan tetapi haji mendapat posisi sosial yang tinggi sebagai orang yang dianggap saleh.

Bagi para haji yang mendirikan pesantren (umumnya disebut kiyai), mereka menjadi pembimbing bagi para muridnya (santri). Kiyai memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain sebagai guru, kiyai juga berperan sebagai pengganti orang tua bagi para santri yang bertempat tinggal di pesantren (mondok). Selain peran-peran itu, kiyai juga dianggap memiliki kekuatan yang lebih dari manusia umumnya, sehingga ia sebagai orang yang disucikan di lingkungan pesantren.<sup>17</sup> Melalui kelebihan yang dimiliki, para kiyai menjadi pembimbing spiritual, baik bagi para santrinya maupun bagi masyarakat sekitar. Dari berbagai keistimewaan (yang bersifat magis, agamis, serta otoritas kepemimpinan) yang dimiliki seorang kiyai, maka menjadi sangat lengkap seorang kiyai dapat dianggap sebagai raja kecil dalam lingkungan pesantren.<sup>18</sup>

Seiring dengan laju perkembangan *Pan-Islamisme*, Indonesia secara ketat telah dicengkeram oleh Kolonialisme Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sangat ketat dalam memberlakukan pencegahan terhadap laju perkembangan Islam. Akan tetapi, semangat kebangkitan Islam yang dibawah oleh para haji dari Mekah, akhirnya menjadi media untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia. Pada prosesnya, wacana *Pan-Islamisme* semakin bersentuhan dalam ranah politik, sebagai upaya untuk memperjuangan rakyat bumiputera yang tertindas oleh bentuk kolonialisme Belanda. Pada tahap ini, *Pan-Islamisme* telah melebur dalam semangat perjuangan pembebasan melalui berbagai bentuk seperti pemberontakan, pergerakan melalui organisasi modern, dll.<sup>19</sup>

Sikap-sikap penentangan yang dilakukan oleh bumiputera terhadap Belanda, pada dasarnya dipengaruhi banyak hal. Seperti halnya sikap sewenang-wenang Belanda terhadap rakyat bumiputera, serta yang paling penting adalah, proses Kristenisasi. Pada prosesnya, Kristenisasi justru menjadi salah satu program pemerintah Hindia Belanda yang saat itu diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg tahun 1909.<sup>20</sup> Diberlakukannya Kristenisasi di Indonesia adalah sebagai upaya untuk menekan laju perkembangan Islam di Indonesia. Bentuk-bentuk penekanan terhadap perkembangan Islam di Indonesia dimaksudkan oleh Belanda untuk memberikan pilihan bagi bumiputera dalam memberlakukan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyebaran Agama Kristen yang dilegalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, oleh umat Islam lebih dilihat sebagai proses "pengkafiran" bumiputera yang saat itu mayoritas beragama Islam.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 17-18.

<sup>18</sup> Penjelasan mengenai kiyai, lihat Clifford Geertz, *Santri, Abangan, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hal. 241-247.

<sup>19</sup> Di Sumatera, Islam menjadi sebuah semangat baru dalam melawan praktik-praktik adat yang dianggap tidak baik menurut ajaran Islam. Seperti yang dilakukan oleh Tuanku Nan Tua, ia merupakan tokoh pembaharu Islam yang menolak praktik adat yang dianggap telah keluar dari nilai-nilai Islam. Tuanku Nan Tua kembali ke Sumatera tepatnya di Kota Tua, Agam Selatan, setelah bertahun-tahun belajar agama Islam di Mekah. lihat Cristin Dobin, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah* (Jakarta: INIS, 1992), hal. 149.

<sup>20</sup> Pada dasarnya, instruksi penyebaran Agama Kristen telah dilakukan Parlemen Belanda sejak masa ekspedisi VOC. Instruksi itu mulai dijalankan di seluruh wilayah jajahan pada tahun 1617. Lihat Hubert Jacobs, *Sejarah Gereja di Indonesia* (cet. II) (Jakarta: Badan Penelitian Kristen, 1966), hal. 334-335. Bandingkan dengan Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas Praktik Kolonial Di Hindia Belanda 1900-1942* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 19.

<sup>21</sup> Menurut sensus penduduk tahun 1905, dari 37 juta penduduk Hindia Belanda terdapat 35 juta memeluk agama Islam. Lihat *Encyclopaedie van Nederlansch Indie II, cet.I.*, hal. 168.

Kristenisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda mendapat tanggapan yang sangat ketat dari bumiputera, terutama dari lingkungan kalangan umat Islam (pesantren). Para santri tidak diperkenankan berperilaku menyerupai orang Belanda. Hal demikian disebabkan, para kiyai melarang para santrinya untuk tidak meniru apapun yang berkaitan dengan orang Belanda. Larangan meniru gaya orang-orang Belanda tidak hanya sebatas pada agama yang berbeda, melainkan bentuk-bentuk pakaian serta berbagai tindak-tanduk lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kiyai Hasyim As'ari dari Jombang, ia melarang para santrinya untuk memakai pantolon, dasi dan sepatu, apabila niat penyerupaannya itu dimaksudkan untuk keseluruhannya termasuk kesombongannya, kekafirannya, dan kegagahan orang Belanda.<sup>22</sup>

Sebagai upaya untuk menekan laju persebaran agama Kristen di Indonesia, para kiyai, haji dan ulama meningkatkan nilai-nilai ke-Islam-an serta membentuk sebuah perkumpulan sebagai wadah persatuan umat Islam bumiputera. Seperti halnya H Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim serta berbagai haji lainnya, melalui organisasi Sarekat Islam (SI), mereka bergerak bersama bumiputera lainnya melawan bentuk-bentuk kolonialisme serta Kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. SI dalam perjuangannya juga dibantu oleh para tokoh beserta organ Islam lainnya seperti H. Achmad Dahlan, dengan Muhammadiyah; K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Hasyim Asy'ari, dengan Tswirul Afkar dan NU-nya, serta berbagai tokoh dan organ Islam lain yang juga mendukung arah perjuangan SI. Perlu dicatat lebih lanjut, jumlah haji yang bergabung dalam SI mencapai 10 % dari keseluruhan anggotanya saat itu.<sup>23</sup> Dengan demikian, para haji yang tergabung dalam SI sebagai organ terbesar bumiputera saat itu, menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam proses kebangkitan agama serta kebangkitan bumiputera awal abad ke-20 dalam melawan praktik kolonialisme.

Islamisasi yang telah berjalan sangat lama di Indonesia melalui para agennya dan dimasanya masing-masing, menjadikan Islam menyebar di Indonesia. Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi rakyat bumiputera. Islam telah mendarah daging di dalam sanubari rakyat bumiputera, dan haji menjadi penyambung warta yang sangat penting bagi tingkat ke-ilmu-an serta nilai-nilai mistik (sebagai bentuk singkretisme budaya) lainnya yang telah bercampur seiring menyebarnya Islam di Indonesia.<sup>24</sup>

Bersamaan dengan kebangkitan agama di Indonesia, proses Islamisasi

<sup>22</sup> Sikap-sikap tersebut seringkali berbeda dengan para kiyai yang ada di luar Nahdlatul Ulama' (NU), seperti halnya Kiyai Achmad Dahlan ketua Muhammadiyah yang seringkali dianggap sebagai organ pembaharu Islam. Andre Feillard, *NU vis a vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna* (Jogjakarta: LKiS, 1999), hal. 15. Dalam konteks tertentu, penggunaan pakaian (fashion) yang seringkali dikenakan oleh para da'i, seperti pada bagian atas menggunakan jas, sedangkan pada bagian bawah menggunakan sarung, merupakan fenomena tersendiri bagi kalangan umat Islam di Indonesia yang dapat dikaji secara mendalam dalam lintas sejarah *fashion*. Dalam kajian ini, pembahasan lebih ditujukan pada persoalan fatwa serta himbauan bagi para santri tradisional yang umumnya menggunakan baji kemeja dan pada bagian bawah ditutup dengan menggunakan sarung.

<sup>23</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hal. 31.

<sup>24</sup> Singkretisme budaya selalu menyertai proses persebaran Islam di berbagai wilayah terutama Indonesia. Sebagaimana sifat penyebaran Islam yang lembut (melalui tradisi), maka percampuran antara budaya lokal dan wacana Islam cenderung berjalan seiringan. Seperti yang umum menjadi ciri orang-orang Islam Jawa yang menjalankan Haji di Mekah. Orang-orang Islam Jawa ini sering dicemooh sebagai orang Islam yang masih berbau mistik atau setengah penyembah berhala. Lihat Anthony Reid, "Pan-Islamisme abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia" dalam Nico J. G. Kaptain (edt.), *op.cit.*, hal. 4.

internasional yang didalamnya juga terkait sikap politik Islam internasional (pembentukan *khilafah*) akhirnya bertemu pada sebuah titik dengan kebangkitan Agama Islam di Indonesia. Pesatnya arus Islamisasi internasional serta sikap-sikap politik negara Islam yang di wakili oleh Turki (saat itu berafiliasi dengan Jerman) sangat membantu bagi terhubungnya antara Timur Tengah dengan Indonesia.<sup>25</sup>

Keterhubungan antara Timur Tengah dengan Indonesia juga tampak pada proses pembentukan organisasi Islam yaitu SI. Sejak pendiriannya, para tokoh SI telah melakukan kontak dengan Turki. Turki sangat mendukung bagi kebesaran SI dalam memperjuangkan kepentingan Islam bumiputera untuk melawan kolonialisme Belanda. *Pan-Islamisme* tidak sekedar mengilhami terbentuknya persatuan bumiputera dan umat Islam di Indonesia, melainkan, menjadi penguat basis ideologis Islam dalam membentuk persatuan Islam internasional di Indonesia. Pada tahap inilah, semangat gerakan *Pan-Islamisme* semakin tampak dan cenderung menjadi bagian penting dalam proses perjuangan rakyat bumiputera (terutama SI) dalam melawan kolonialisme Belanda yang kafir.

### C. Islam dan Kesadaran Berbangsa

Tahun 1900-an menjadi periode penting proses muncul dan berkembangnya pergerakan politik Islam di Indonesia (baca: Hindia Belanda, *red.*). Pada dasarnya, kajian tentang Politik Islam ini dimaksudkan untuk menemukan suatu pola dasar bagi kebijakan Belanda dalam menghadapi Islam di Indonesia.<sup>26</sup> Akan tetapi, pada kondisi berbeda, Islam justru dinilai oleh para aktivis pergerakan Islam mampu menjadi pengikat persatuan seluruh rakyat Indonesia.<sup>27</sup> Identitas ke-Islam-an dinilai mampu menjembatani sebuah perbedaan yang di wacanakan oleh pemikiran kolonial bahwa Belanda adalah *civilize* (beradab), sedangkan rakyat Indonesia dianggap *uncivilize* (tidak beradab), atau saat itu disebut *de Inlandsche onderdanen* (bumiputera yang rendah).<sup>28</sup> Lebih dari itu, politik Islam digunakan oleh pergerakan politik bumiputera untuk melawan penetrasi Kristen (baca: kafir) di Indonesia.<sup>29</sup> Kendati demikian, tidak hanya Islam yang menjadi alat pemersatu bagi seluruh rakyat bumiputera, proses Kolonialisme Belanda memiliki arti penting dalam proses pembentukan jati diri bagi rakyat bumiputera. Seperti yang diungkapkan oleh Harry J. Benda, bahwa perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia tidak sedikit merupakan akibat kumulatif dari rangsangan pengaruh Barat.<sup>30</sup> Peningkatan dibidang pendidikan bagi

<sup>25</sup> Jejaring mengenai hubungan Timur tengah dengan Indonesia pada dasarnya telah terjalin sudah lama. Para pewarta Islam (syaikh) menjelang abad ke-17 dan 18, mereka telah menyebar dengan pesat diberbagai penjuru dunia (juga Indonesia). Mengenai genealogis jaringan para ulama, selengkapnya lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII akar pembaharuan Islam Indonesia* (cet.2) (Jakarta: Prenada Media, 2005), bab 1. Seperti halnya yang terjadi pada perang Aceh, bendera Negara Turki (bulan sabit) telah dikibarkan oleh para militer Turki yang saat itu sedang membantu para pejuang Aceh dalam melawan penjajah Belanda. Lihat Anthony Reid, "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia" dalam Nico J. G. Kaptain, (edt.), *op.cit.*, hal. 1-27.

<sup>26</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche zaken* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 2.

<sup>27</sup> Menurut sensus penduduk tahun 1905, dari 37 juta penduduk Hindia Belanda terdapat 35 juta memeluk Agama Islam. Lihat *Encyclopedaie van Nederlansch Indie II, cet.1.*, hal. 168.

<sup>28</sup> Korver, A.P.E., *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta, Grafitipers, 1985), hal. 50.

<sup>29</sup> Bagi umat Islam, orang Belanda adalah kafir. Di Aceh, orang Belanda adalah orang *kape* (kafir). Lihat Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 17.

<sup>30</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal. 53.

rakyat bumiputera –sebagai bagian dari program politik etis- memiliki andil besar dalam membuka wacana persamaan, dan persatuan bagi kalangan muda Indonsia. Untuk mencapai persamaan hak, kedudukan serta kewenangan sebagai sebuah bangsa, kaum muda membentuk perkumpulan bumiputera. Pada tahun 1906, Tirtoadhisuryo bersama kawan-kawan mendirikan Syarekat Prijaji.<sup>31</sup> Sarekat Priyayi adalah sebuah persarikatan para bangsawan dan priyayi. Tujuan dari organ ini adalah melalui persatuan para bangsawan dan priyayi untuk mensejahterakan rakyat bumiputera melalui pendidikan dan pengajaran formal para anak-anak bangsawan dan priyayi bumiputera. Ada 5 tujuan organ tersebut dan salah satunya adalah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada semua bumiputera yang tidak mampu.<sup>32</sup> Para penggagas Sarekat priyayi adalah: 1) *Voorloopig Bestuur* R. Mas Prawirodiningrat, Ridder Oranje Nassau Hoofddjaksa Betawi: *President*; 2) Tamrin Moehamad Tabrie, *Commandant district Mangga Besar*; 3) Taidji'in Moehadjilin, *Commandant district tanah abang*; Bachram, *Commandant district Pandjaringan*; R. Mas Tirtoadhiesoerjo, *Journalist di Waltevreden* (Leden serta merangkap sebagai *Secretaris-Thesuurier*.<sup>33</sup> *Vergadering* awal dilakukan di Meester Cornelis (Jati Negara), dan Patih Meester Cornelis menjadi penanggungjawab perkumpulan tersebut. Sejak pembentukan sarekat, jumlah keanggotaan telah mencapai 700 orang, hampir semua masyarakat Meester Cornelis melebur didalamnya saat itu.<sup>34</sup>

Seiring meningkatnya keanggotaan dalam Sarekat Priyayi, surat kabar menjadi prioritas utama untuk menjalin warta diantara para anggota. Medan Priyayi itulah nama suratkabarnya dan sejak tanggal 1 Januari 1907, pertamakali beredar sebagai surat kabar yang dimiliki bumiputera. Sesuai dengan mottonya "*Oentoeq Radja-radja bangsawan asali, bangsawan pikiran, prijaji-prijaji dan kaum moeda dari bangsa pribumi serta bangsa jang dipersamahken di sehloeroeh Hindia-olanda*",<sup>35</sup> surat kabar ini menampung semua aspirasi bumiputera tanpa terkecuali. Medan Priyayi pada mulanya terbit seminggu sekali. Ketika semakin meningkatnya permintaan suratkabar di berbagai daerah, akhirnya diterbitkan secara harian. Melalui surat kabar itulah, ide bersatu bagi seluruh rakyat Indonesia disebar di seluruh Indonesia.

Kekuatan pers bumiputera saat itu menjadi sangat nyata dalam membangun jaringan diantara para anggota sarekat.<sup>36</sup> Semakin berkembangnya surat kabar bumiputera, ternyata tidak dibarengi dengan meningkatnya kelembagaan di dalam Sarekat Priyayi itu sendiri. Kekuatan Sarekat Priyayi semakin melemah. Unsur dominan kelemahan Sarekat Priyayi adalah terbengkalainya administrasi keuangan serta dasar organisasi yang bertumpu pada kesatuan para priyayi bumiputera. Dasar persatuan Sarekat Priyayi semakin mempersempit persebaran anggota dalam sarekat. Ruang gerak sarekat seolah-olah dibatasi dan tunduk pada aturan-aturan para priyayi yang sebetulnya, mereka kebanyakan sebagai kaki tangan Pemerintah Hindia Belanda. Di lain pihak, para priyayi merupakan kelompok sosial yang relatif lebih pasif dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. Secara politis, kelompok sosial priyayi tidak mampu

<sup>31</sup> Kata Syarekat selanjutnya ditulis Sarekat, sedangkan kata Prijaji, selanjutnya ditulis Priyayi. Hanya ketika dalam kutipan langsung, penulis tetap menggunakan sesuai aslinya. Perubahan masing-masing kata dalam tulisan ini semata-mata untuk konsistensi penulisan.

<sup>32</sup> "Pendahoeloean M.P. taoen 1909" *Medan Prijaji*, 1909, hal. 8.

<sup>33</sup> *Medan Prijaji*, 1909, hal. 7.

<sup>34</sup> *Medan Prijaji*, 1909, hal. 10.

<sup>35</sup> Motto tertera pada halaman muka setiap terbitan surat kabar Medan Prijaji.

<sup>36</sup> Surat kabar Medan Prijaji menjadi penyambung komunikasi bagi bumiputera. Selain itu, massifitas Bumiputera sebagai pembaca Medan Prijaji tidak dapat diragukan, lihat tajuk *Soeratnya Orang-orang Desa Bapangan pada Hoofd Red. M.P.* Medan Prijaji, tahun 1909, hal. 15-18.

melawan setiap kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif, terkait dengan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang lebih berpihak kepada mereka.

Melemahnya Sarekat Priyayi tidak mempengaruhi persebaran surat kabar Medan Priyayi. Medan Priyayi justru semakin menampakkan keuletan serta ketangguhan sebagai koran buatan bumiputera. Berbagai informasi telah diterbitkan dalam surat kabar ini. Bantuan hukum yang ditawarkan oleh surat kabar ini, semakin mempercepat arus perkembangan Medan Priyayi. Saat itu, Medan Priyayi menjadi koran dengan jumlah cetakan yang paling besar di Hindia Belanda.

Runtuhnya Sarekat Priyayi menjadi catatan khusus bagi Tirtoadhisuryo dan kawan-kawan, karena persatuan dikalangan priyayi belum menjawab tuntutan bersatu bagi seluruh strata bumiputera di Indonesia. Setelah runtuhnya Sarekat Priyayi, tepatnya pada tahun 1908 perkumpulan Budi Utomo (selanjutnya disebut BU) di bentuk.<sup>37</sup> Pembentukan BU dimotori oleh sebagian besar pelajar STOVIA yang terlahir dari kalangan priyayi juga. BU dipimpin seorang Bupati Solo Raden Adipati Tirto Koesomo, dan Tjiptomangunkusumo bertindak sebagai Sekretaris.<sup>38</sup> Kekuatan BU begitu luar biasa di wilayah Batavia,<sup>39</sup> Solo dan Yogyakarta. Para pimpinan administrasi dan para bawahannya berbondong-bondong menjadi anggota perkumpulan tersebut. Selain itu, masyarakat yang berada di wilayah *Vorstenlanden* (wilayah tanah kerajaan) juga tidak ketinggalan, mereka berbondong-bondong mendaftar sebagai anggota perkumpulan tersebut. Berbagai sekolahan dibentuk, dan pendidikan formal menjadi dasar kekuatan perkumpulan ini. Semakin lama perkumpulan ini hadir dalam masyarakat bumiputera, semakin tidak memperlihatkan kegigihan serta kegarangan dalam melawan sistem Pemerintahan Hindia Belanda yang diskriminatif, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang di luar identitas priyayi (yang secara umum beragama Islam).

Pada masa awal pembentukan BU, Tirtoadhisuryo (pimpinan redaksi Medan Priyayi) menolak tawaran dr. Soetomo<sup>40</sup> untuk bergabung dalam lembaga tersebut. Penolakan Tirtoadhisuryo sangat jelas, bahwa BU dianggap tidak ubahnya Sarekat Priyayi yang hanya menghimpun kekuatan para priyayi. Tirtoadhisuryo tidak ingin mengulangi kegagalannya kembali dalam BU yang hanya mengikat persatuan priyayi dan bukan persatuan seluruh bumiputera tanpa memandang ras, serta golongan dan tidak dibatasi geografis Jawa, Madura atau Sumatera.

Pada tahun 1909, Tirtoadhisuryo mendirikan Sarikat Dagang Islamiah (selanjutnya disebut SDI).<sup>41</sup> Istilah "dagang" dianggap mewakili kelompok atau stratifikasi sosial tertentu. Para pedagang, merupakan bagian dari struktur sosial yang relatif memiliki tingkat kebebasan tinggi (tanpa tekanan pemerintah), sebagaimana hal

<sup>37</sup> Mengenai ide serta gagasan pendirian Boedi Oetomo (Usaha Luhur), selengkapnya lihat Soewarno (Sekretaris 1 BU), *Circulair* (Surat edaran tentang pendirian Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, *Weltevreden*: 1908). Lihat Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989).

<sup>38</sup> Goenawan Mangoenkoesomo, *De Geboorte Van Boedi Oetomo* (lahirnya Boedi Oetomo) dalam Pitut Soeharto-drs. A. Zainoel Ihsan, *Cahaya di kegelapan, Capita Selecta kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam pertumbuhannya dalam dokumen asli* (Jakarta: Jayasakti, 1981), hal. 25-39.

<sup>39</sup> Pembentukan Boedi Oetomo di Weltevreden dilakukan pada tahun 1909. Lebih dari 500 orang memadati halaman Kebun Binatang Weltevreden pada saat pembentukan organ tersebut. Lihat "Boedi Oetomo" *Medan Prijaji*, 1909, hal. 75-80 *bersambung*.

<sup>40</sup> Masa awal pendirian Boedi Oetomo, Soetomo masih terdaftar sebagai siswa STOVIA menginjak tahun ke-3 dan menjabat sebagai Presiden Pengurus Budyatama Cabang Jakarta. Pitut Soeharto-drs. A. Zainoel Ihsan, *Kapita Selecta...*, *op.cit.*, hal. 57-64.

<sup>41</sup> Mengenai ide dasar pembentukan SDI secara jelas lihat tulisan S.A.A. Badjenet-R.M. Tirtoadisoerjo, "Sarikat Dagang Islamiah" *Medan Prijaji*, 1909, hal. 181-195.

tersebut berlaku bagi para priyayi. Bebas atas tekanan ekonomi, serta bebas terhadap tekanan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Sesuai dengan namanya, SDI berasaskan Islam.<sup>42</sup> Dasar Islam merupakan tanggapan terhadap mayoritas bumiputera yang beragama Islam. Melalui dasar Islam dan bergerak di bidang perdagangan, kelembagaan tersebut diharapkan mampu menjawab dan mengikat rasa kesatuan bumiputera seluruhnya tanpa memandang golongan. Seperti yang diungkapkan oleh Tirtoadhisuryo:

Keadaan perniagaan jang dilakoekan oleh bangsa Islam di Hindia Olanda, djika dibandingkan dengan pri perniagaan bangsa Eropa adalah djaoehkoerang sampoernanja. Martabat dan derajat pedagang Islam di Hindia ini ada sanget rendahnja. Kerna kekoerangan kesempoernaan itoe, sehingga priboemi bangsa Islam jang berbangsa tiada begitoe soeka mendjadi kaum pedagang hanja jang teroedak, melainkan djabatan kepangkatan dan pekerdjaan jang sehoemoer-hoemoer tida melepaskan dirinja dari peri pekoelian...<sup>43</sup>

Dalam tulisannya, Tirto melihat adanya ketimpangan dalam kehidupan para pedagang Islam bumiputera. Para pedagang Islam bumiputera tidak dapat diimbangkan dengan para pedagang Eropa. Kaum pedagang Islam bumiputera akan terus menjadi bangsa *koeli* karena rendahnya status sosialnya. Ketidak seimbangan antara pedagang Islam dengan Eropa adalah karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan dikalangan para pedagang Islam yang telah tersebar di seluruh penjuru nusantara.

SDI menjadi satu-satunya kelembagaan yang dapat menampung seluruh strata sosial bumiputera. SDI sebagai perkumpulan yang di sahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun permulaan pendiriannya, telah menarik perhatian banyak kalangan, baik para pedagang bumiputera, Arab dan Cina.<sup>44</sup> Berbagai pertemuan dilakukan, dan secara cepat berdiri cabang-cabang SDI di daerah dengan pusatnya di *Buitenzorg* (Bogor). Sebagai upaya untuk membangun ikatan serta persebaran informasi tentang tema-tema pergerakan saat itu, Medan Priyayi kembali menjadi penyambung warta bagi seluruh anggota sarekat. Medan Priyayi menjadi agen<sup>45</sup> bagi persebaran SDI di berbagai daerah.

Struktur kepengurusan dibentuk dengan uraian sebagai berikut; *Presiden*: Sech Achmad bin Abdurachman Badjenet (saudagar tinggal di bogor); *Vice President*: Mohammad Dagrim (Docter Djawa di Bogor); *Commissaris-commissaris*: Sech Achmad bin Said Badjenet, Sech Galib bin Said bin Tebe, Sech Mohammad bin Said Badjenet, Mas Railoes (kwsa tanah tinggal di Bogor), dan Hadji Mohammad Arsad (tinggl di Batavia); *Kassier*: Sech Said bin Abdurrachman Badjenet (di Bogor); *Secretaris Adviseur*: Raden Mas Tirtoadhisuryo (Hoofd Redacteur Medan Prijaji).<sup>46</sup>

Selain SDI Bogor yang berlabel Islam, di Surakarta pada dasarnya telah berdiri

<sup>42</sup> "Statuten Perhimpunan Sarikat Dagang Islamiah" *Medan Prijaji*, 1909, hal. 199.

<sup>43</sup> "Sarekat Dagang Islamiah" *Medan Prijaji*, 1909, hal. 181.

<sup>44</sup> Yang diperbolehkan menjadi anggota SDI adalah semua orang yang beragama Islam. Sedangkan yang tidak beragama Islam tetap diperbolehkan bergabung dan menjadi anggota kehormatan. Selengkapnya lihat "Statuten SDI" "Fazal 4. Perhimpunan ada terkait dari anggota-anggota biasa dan anggota kehormatan" *Medan Prijaji*, 1909, hal. 199.

<sup>45</sup> Penjelasan lebih lanjut mengenai ke-agen-an (*agency*) lihat Laura M. Ahearn, *Annual Review Anthropologi 2001.30:109-137*. Dalam *Agency, Knowledge and nature 1&2* (Yogyakarta: Academy Professorship Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007), hal. 112.

<sup>46</sup> *Medan Prijaji*, 1909, hal. 191.

organisasi yang juga berlabel Islam, sebelum SDI Bogor yang mendapat pengesahan dari Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909. Organisasi itu juga bernama Sarekat Dagang Islam (baca: SDI Surakarta). SDI Surakarta ini berdiri pada 16 Oktober 1905,<sup>47</sup> dan dipimpin oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan.<sup>48</sup>

SDI Surakarta memang tidak mendapat pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda, dan ketika terjadi bentrokan antara orang Tionghoa dengan bumiputera (melibatkan legiun Mangkunegoro), maka pemerintah Hindia Belanda melakukan penyelidikan terhadap masing-masing pihak itu. Pada tahap inilah, Samanhudi meminta bantuan kepada Tirtoadhisuryo untuk membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai bukti bahwa SDI Surakarta adalah organisasi yang legal. Dengan demikian, SDI Surakarta akhirnya dimasukkan sebagai cabang SDI Bogor yang dipimpin oleh Tirtoadhisuryo.<sup>49</sup> Diresmikannya SDI Surakarta sebagai cabang SDI Bogor memang tidak bertentangan dengan *Statuten* dan *Huishoudelijk Reglement* SDI Bogor.

*fatzal 1. diloear Bogor maka djika banjarknja anggota ada lebih dari 50 orang maka disitoe diadakan tjabang dengan mempoenjai kaum pengerooes sendiri jang dipilih alih anggota-anggota disitoe dengan moefakatnja Hoofd Bestuur dari tjabang ini melakoekan pekerdjaan seperti wakilnya Hoofd Bestuur.*<sup>50</sup>

SDI Surakarta berkembang sangat cepat.<sup>51</sup> Anggotanya tidak lagi terbatas pada para pedagang, melainkan berbagai jenis strata masyarakat bumiputera. Konsentrasi utama SDI adalah mengamankan perdagangan bumiputera. Seiring dengan meningkatnya keanggotaan, SDI tidak hanya fokus pada aspek mengamankan perdagangan bumiputera, melainkan juga mengatur praktik berdagang serta penyebarannya. Dengan demikian, relasi perdagangan bumiputera menyebar di seluruh nusantara. Sampai tahun 1910, SDI memiliki anggota sebanyak 300.000. Jumlah anggota sebanyak itu, menjadikan SDI sebagai organisasi terbesar di Indonesia saat itu.<sup>52</sup>

Peningkatan anggota SDI tidak dapat dibendung. Hampir seluruh lapisan masyarakat bumiputera di luar pedagang, larut dalam keanggotaan sarekat. Seperti tujuan awal pembentukan SDI adalah untuk menyatukan seluruh bumiputera, maka SDI dirubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Perubahan nama SDI menjadi SI adalah menghilangkan kata “dagang” yang termaktub dalam nama perkumpulan serta Anggaran Dasarnya. Perubahan itu dilakukan pada tanggal 10 September 1912 di depan Akte Notaris Surakarta. Sejak ditetapkannya di depan Akta Notaris tersebut, maka perkumpulan ini tidak lagi memakai nama SDI melainkan SI.<sup>53</sup>

<sup>47</sup> Tamar Jaya, “Menurut H. Samanhudi”, *Tahun 1905 Hari Kebangkitan Nasional* (Jakarta: Prasarana dalam Seminar Sejarah Perjuangan Islam Indonesia, 7-10 Mei 1971), hal. 17.

<sup>48</sup> Tamar Jaya, “Keterangan Tjokroaminoto” *Tahun 1905 Hari Kebangkitan Nasional, op.cit.*, hal. 19.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 19-20.

<sup>50</sup> “Huishoudelijk Reglement SDI” (aturan yang berlaku SDI) *Medan Prijaji*, 1909., hal. 205.

<sup>51</sup> “Verslag Congres S.I. Yogyakarta, 19-20 April 1914, Suatu Penjelasan” *Darmokondo*, April 1914.

<sup>52</sup> Bandingkan dengan Bernhard Dahm, *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1969), hal. 13-14. Bernard mencatat keanggotaan SDI di Jawa antara tahun 1912-1914, sebanyak 366,913 orang, dan antara tahun 1915-1915, keanggotaan walaupun terdapat penurunan pada tahun 1915-1917, akan tetapi sampai tahun 1918, jumlah keanggotaan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 389,410.

<sup>53</sup> Berkaitan dengan tahun pendirian Sarekat Islam, terdapat berbagai kalangan yang masih memperdebatkan bahwa SI adalah organisasi bumiputera yang lebih tua daripada Budi Utomo. Akan tetapi, penulis disini tidak akan menyertakan perdebatan hal tersebut, karena hal demikian tidak menjadi bahasan substansi dari tulisan ini. Mengenai berbagai argumentasi yang mendukung seputar pendirian

Seiring dengan meningkatnya perdagangan bumiputera, SI telah menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Seperti halnya di Surabaya. Perkembangan SI di Surabaya memainkan peranan yang penting dalam mengorganisir masyarakat dalam sebuah wadah perkumpulan bumiputera. SI Surabaya dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto, yang berikutnya menjadi *Hoofdbestuur* (pimpinan besar) SI.<sup>54</sup> Keberadaan SI Surabaya sangat membantu terjalannya hubungan perdagangan secara meluas sebagai upaya memantapkan perekonomian bumiputera. Perdagangan merupakan salah satu aspek yang diprogramkan sebagai tujuan perkumpulan, selain tolong menolong dalam upacara kematian dan rasa persaudaraan. Pengejawantahan dari pengembangan perekonomian perdagangan adalah pembentukan sistem koperasi-koperasi konsumsi di berbagai cabang di daerah. Selain perdagangan dan perekonomian, agama, pendidikan, sosial, hukum, serta politik juga menjadi program yang dicanangkan oleh SI.

Kaum bumiputera telah sadar akan pentingnya sebuah perkumpulan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan. Ide dan gagasan bersatu bumiputera telah terwujud. Melalui SI, ide itu terus dibina dan dikembangkan menjadi lebih luas. Kebesaran SI menjadi tanda bahwa bumiputera telah menemukan kekuatannya. Sadar akan kekuatan yang dimiliki, SI mengorganisir berbagai serikat buruh. Melalui serikat buruh, SI mempraksiskan gerakannya untuk melawan perilaku diskriminatif serta berbagai penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

#### **D. Kecenderungan Jepang Terhadap Politik Islam**

Menjelang tahun 1939, ketika posisi Jepang semakin merapat ke selatan, pandangan yang sama nampaknya hadir dalam pemikiran Jepang, bahwa politik Islam menjadi momok dalam proses pendudukan Indonesia. Tidak ubahnya Belanda, Jepang pada proses penguasaan atas Indonesia juga melakukan pendekatan terhadap umat Islam. Jaringan Islam Internasional dibangun untuk menarik simpati muslim dunia termasuk Indonesia. Pada tahun ini, Jepang mengundang federasi Islam di berbagai negara dunia terutama MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) dari Indonesia. Beberapa tokoh Islam yang dikirim oleh MIAI untuk menghadiri konferensi di Jepang adalah H. A. Kahar Moedzakir, H. Moehammad Faried, tuan dan nyonya Mr. Achmad Kasmat, H. Oesman Machfoed Siddik, dan Abdullah Oesman Alamoedhi. Kesemunya walaupun dari lembaga yang berbeda, akan tetapi mereka secara resmi sebagai perwakilan atas nama MIAI.<sup>55</sup>

Corong dunia Islam kembali melebar di wilayah Asia. Secara cepat Jepang diposisikan sebagai pusat kegiatan Islam kedua setelah Timur Tengah. Akan tetapi, berbagai kepentingan politik yang memboncengi semangat Islam tidak dapat dihindari. Tahun 1942 Jepang secara resmi menginjakkan kakinya di bumi Indonesia melalui kekuatan militer. Kekuatan Islam Jepang akhirnya diambil alih kekuatan militer atas kewenangan sebuah negara. Semangat Islam sebagai sebuah pengikat persaudaraan Islam antara Jepang dan Indonesia mulai melemah dan digantikan semangat

---

awal SI diteliti lebih lanjut oleh Ahmad Timur Jaylani dalam tesis M.A., *The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalism* (Montreal: McGill University, 1958). Jejak analisis Jaylani juga diikuti oleh Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942* (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008).

<sup>54</sup> Asisten Residen Kepolisian Surabaya (schippers) kepada Residen Surabaya, 1913, dalam Sartono Kartodirdjo, *Sarekat Islam Lokal, op.cit.*, hal. 271.

<sup>55</sup> Oemar Yadi, "Oetoesan Persatoean Islam M.I.A.I. di Djepoen" *Pandji Islam*, 31 Desember 1939, hal. 7075/1034.-7076/1035.

persaudaraan yang akrab disebut "gerakan 3 A", *Nippon Cahaya Asia*, *Nippon Pelindung Asia*, dan *Nippon Pembela Asia*. Sejak tahun ini pula, semua organisasi yang didirikan pada masa pemerinatahn Belanda di Indonesia dihapus oleh Jepang.<sup>56</sup>

Bagi kelompok Islam, penghapusan partai politik yang dilakukan Jepang, tidak menimbulka banyak masalah, hal ini disebabkan Jepang memberikan fasilitas yang lebih kepada seluruh umat Islam untuk bergabung dalam MIAI sebagai forum umat Islam di Indonesia. Jepang memberikan keleluasaan terhadap umat Islam bukan berarti tidak memiliki maksud apapun. Jepang memberikan keleluasaan terhadap umat Islam adalah untuk menarik simpati umat Islam Indonesia untuk mendukung perjuangan Jepang di tingkat internasional.

MIAI sebagai satu-satunya federasi umat Islam yang masih hidup pada masa Jepang, akhirnya menuai ajalnya pada tahun 1943. Hilangnya MIAI sebagai federasi umat Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Benda merupakan awal kemenangan Jepang terhadap umat Islam Indonesia.<sup>57</sup> Tujuan Jepang untuk menaklukkan Islam di Indonesia untuk sementara waktu menuai keberhasilan. Politik pecah belah terhadap umat Islam mulai dijalankan oleh Jepang. MIAI dihancurkan diganti dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai federasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU).<sup>58</sup>

Dalam proses pencapaian keberhasilannya untuk mengkerdikan umat Islam, Jepang tetap menjaga jarak secara bertahap. Jepang secara perlahan membuka ruang bagi kelompok nasionalis untuk berperan dalam lembaga yang dibentuknya. Pada tahap inilah, pergolakan politik urat saraf kedua anak bangsa antara Islam dan nasionalis dimunculkan oleh Jepang. *Pertama*: Jepang meningkatkan perwakilan Islam di dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang, *kedua*: Jepang mempercayakan kepada kiai dan ulama sebagai dominasi politik penting dalam masyarakat paling bawah sebagai kepanjangan tangan Masyumi di tingkat pusat, *ketiga*: Masyumi memiliki tempat utama dalam mekanisme pada pusat *Djawa Hokokai* (Organisasi pelayanan Rakyat di Jawa). Semua kewenangan ini ternyata tidak berlaku bagi kelompok nasionalis, bahkan *Djawa Hokokai* yang seharusnya mampu dimainkan oleh kelompok nasionalis justru diambil alih oleh priyayi dan atau lurah di tingkat masyarakat paling bawah di Indonesia.<sup>59</sup>

Kondisi demikian secara berangsur mulai berubah ketika Tokyo memutuskan untuk menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada musim gugur tanggal 7 September 1944.<sup>60</sup> Janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Kaiso disikapi oleh Masyumi secara cepat. Pada bulan Oktober para eksekutif Masyumi melakukan pertemuan di Jakarta dan menghasilkan kesepakatan berikut: "Dengan Nippon kita berdiri, dengan Nippon kita Jatuh, di jalan Allah untuk membinasakan tirani musuh".<sup>61</sup> Dari kesepakatan yang dikeluarkan oleh Masyumi ini dapat dilihat, bahwa Jepang tidak sepenuhnya mampu menarik arus politik Islam dalam proses perjuangannya. Kembali meminjam pernyataan W.F. Wertheim, bahwa *Matahari Terbit* sia-sia mencoba menarik *Bulan Sabit* untuk menetap di orbitnya. *Bulan Sabit* terlalu besar untuk menjadi satelit yang tidak

<sup>56</sup> H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahaei Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), hal. 142.

<sup>57</sup> Benda, *Op.Cit.*, hal. 183.

<sup>58</sup> Sihombing, *Pemuda Indonesia menantang Fasisme Jepang* (Djakarta: Sinar Djaya, tanpa tahun), hal. 183. Lihat Benda, *op.cit.*, hal. 185. Lihat. *Asia Raya*, 1 Januari 2604/ 1944.

<sup>59</sup> Benda, *Op.Cit.*, hal. 188-189.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 210.

<sup>61</sup> *Suara Muslim Indonesia*, 15 Oktober 1944.

berbahaya bagi siapapun, untuk sekedar menjadi sebuah sputnik.<sup>62</sup>

Persinggungan antara kelompok Islam dengan nasionalis pada dasarnya tidak dapat dihindarkan sejak masa Kolonial Belanda.<sup>63</sup> Jalan dan model perjuangan yang ditempuh selalu berbeda, walaupun pada saat tertentu mereka bertemu, akan tetapi selalu tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang maksimal. Persinggungan diantara keduanya tidak berhenti pada masa penjajahan Jepang, melainkan terus berlanjut hingga masa berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia. Sampai akhir penjajahan Jepang di Indonesia, persinggungan diantara keduanya justru semakin meruncing pada saat proses perumusan Dasar Negara Indonesia. Dari perdebatan merekalah, rumusan Dasar Negara Indonesia tercipta. Rumusan Dasar Negara Indonesia yang telah dihasilkan dari perdebatan panjang diantara keduanya apakah sebuah kompromi atau justru pemaksaan atas satu terhadap yang lain, masih menjadi tanda tanya besar. Kondisi demikian dapat ditelusuri dari berbagai peristiwa penting yang muncul pasca berdirinya Negara Indonesia hingga tahun 1950-an.<sup>64</sup> Gejala di berbagai daerah yang menandai persinggungan antara Islam dan nasionalis tampak dengan jelas. Hingga saat ini, efek dari perdebatan keduanya di masa lalu masih menyisakan persoalan besar bagi bangsa dan Negara Indonesia.

### E. Kesimpulan

Ketika Pemerintah Hindia Belanda menerapkan Politik Islam sebagai upaya untuk mengkerdilkan kekuatan Islam di Indonesia, Islam justeru tampil dan menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat bumiputera saat itu. Islam mampu mengurai ketimpangan dan keterpurukan yang diakibatkan oleh praktik penjajahan. Islam sekali lagi menjadi cahaya terang bagi seluruh rakyat bumiputera. Perihal penting yang dapat digaris bawahi adalah, bahwa Islam baik sebagai agama maupun ideologi berada dalam kesadaran tertinggi rakyat bumiputera saat itu, sehingga Islam mampu menjadi pendorong dan penentu sikap rakyat bumiputera dalam berperilaku. Kesadaran Islam yang saat itu muncul akhirnya dapat menilai bahwa ketimpangan, dan berbagai persoalan yang saat itu muncul adalah disebabkan oleh Kolonialisme dan yang menyerupainya serta proses Kristenisasi. Dengan adanya “musuh bersama” ini, Islam menjadi cahaya terang bagi sebuah kondisi yang timpang, sehingga Islam mampu menjadi dasar bagi terbentuknya sebuah ikatan persatuan diantara Rakyat Bumiputera.

Menjadi berbeda ketika Islam tidak mengetahui, tidak memiliki dan tidak merasa memiliki musuh bersama, maka Islam tidak lagi menjadi dasar persatuan, melainkan Islam menjadi klaim untuk melabelkan sebuah kebenaran diantara sesama dan menegaskan dirinya (baca: umat Islam, *red.*) telah kehilangan ruh perjuangannya sendiri. Oleh karena itu, Islam harus menemukan kembali “musuh bersama” untuk mengembalikan makna dan identitas Islam itu sendiri.

<sup>62</sup> Benda, *Op.Cit.*, hal. 10.

<sup>63</sup> Ingleson, John., *Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta: LP3ES, 1978), hal. 142.

<sup>64</sup> Lihat Leirissa, R.Z., *PRRI/ Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991). Bandingkan dengan Kahin, Audrey., *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). Bandingkan dengan S. Lev, Daniel., *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politic, 1957-1959* (Ithaca, New York: Cornell University, 1966).

---

**DAFTAR PUSTAKA**
**A. Buku**

- A. Zainoel Ihsan, *Cahaya di kegelapan, Capita Selecta kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam pertumbuhannya dalam dokumen asli*, Jakarta: Jayasakti, 1981.
- Aboebakar Aceh, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, Semarang: C.V. Ramadhani, 1979.
- Ahearn, Laura M., *Annual Review Antrhopologi 2001.30:109-137*. Dalam *Agency, Knowledge and nature 1&2*, Yogyakarta: Academy Professorship Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche zaken*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII akar pembaharuan Islam Indonesia (cet.2)*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Dahm, Bernhard., *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1969.
- Dobin, Cristin., *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah*, Jakarta: INIS, 1992.
- Feillard, Andre., *NU vis a vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna* (Jogjakarta: LKiS, 1999).
- Geertz, Clifford., *Santri, Abangan, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Gouda, Frances., *Dutch Culture Overseas Praktik Kolonial Di Hindia Belanda 1900-1942*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Graaf, H.J. De., dan Pigeaud, TH., *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI* (terj.), Jakarta: PT. Pustaka Utama dan KITLV, 1986.
- Hurgronje, Snouck., *Perayaan Mekah, seri INIS jilid V*, Jakarta: INIS, 1989.
- Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Ingleson, John., *Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1978.
- Jacobs, Hubert., *Sejarah Gereja di Indonesia (cet. II)*, Jakarta: Badan Penelitian Kristen, 1966.
- Kahin, Audrey., *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kaptain, Nico J.G., (edt.), *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh*, Leiden-Jakarta, Seri INIS XLIII, 2003.
- Kohn, Hans., *Nasionalisme Arti dan Sejarahahnya*, Jakarta: Erlangga, 1984.

- Korver, A.P.E., *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, Jakarta, Grafitipers, 1985.
- Leirissa, R.Z., *PRRI/ Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Lev, Daniel S., *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politic, 1957-1959*, Ithaca, New York: Cornell University, 1966.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Moh. Zainal S., *Sedjarah Bunga dan Bergelornya Pesantren Sampurnan*, Gresik: BKK Maskumambang, 1962.
- Nagazumi, Akira., *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Nasihin., *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, Djakarta: P.T. Kartika Tama, 1971.
- Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008.
- Sartono kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888*, The Hague: Nijhoff, 1966.
- Sihombing, *Pemuda Indonesia menantang Fasisme Jepang*, Djakarta: Sinar Djaya, tanpa tahun.
- Subehan Sd., *Langkah Merah: Gerakan PKI, 1950-1955*, Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
- Taufik Abdullah., *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.

### **B. Disertasi, Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar**

- Ahmad Timur Jaylani dalam tesis M.A., *The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nasionalisme*, Montreal: McGill University, 1958.
- Tamar Jaya, "Menurut H. Samanhudi", *Tahun 1905 Hari Kebangkitan Nasional*, Jakarta: Prasarana dalam Seminar Sejarah Perjuangan Islam Indonesia, 7-10 Mei 1971.
- Encyclopedaie van Nederlansch Indie II, cet.I*  
*Medan Prijaji*, 1909, hlm. 10.  
*Medan Prijaji*, 1909, hlm. 7.  
*Medan Prijaji*, 1909, hlm. 8.  
*Pandji Islam*, 31 Desember 1939, hlm. 7075/1034.-7076/1035.  
*Suara Muslim Indonesia*, 15 Oktober 1944.